

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	22
1. Sejarah Kriminalisasi Pencucian Uang dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang	28
3. Kedudukan Tindak Pidana Asal terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang	34
4. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang	37
B. Tinjauan Umum tentang Perampasan Aset	44
1. Sistem Perampasan Aset dan Jenis-Jenis Perampasan Aset.....	44
2. <i>Administratif Forfeiture</i>	47
3. <i>Criminal Forfeiture</i> atau <i>Conviction Based Asset Forfeiture</i>	49

4. <i>Civil Forfeiture</i> atau <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	55
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	58
B. Bahan Penelitian.....	60
C. Cara Pengumpulan Data	66
D. Analisis Hasil Penelitian.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Kedudukan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Tindak Pidana Asal dihubungkan dengan konsep <i>Stand-Alone Money Laundering</i>	72
1. Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai <i>Follow up Crime</i> (Tindak Pidana Lanjutan).....	75
2. Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai <i>Independent Crime</i> (Tindak Pidana yang Berdiri Sendiri atau Independen)	80
3. Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai <i>Stand-Alone Money Laundering</i> serta Pengaturannya pada Konvensi Internasional.....	87
4. Konsep <i>Stand-Alone Money Laundering</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	102
5. Perbandingan Konsep <i>Stand-Alone Money Laundering</i> dengan <i>Independent Crime</i> Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Tindak Pidana Asal	107
6. Parameter yang Digunakan dalam Putusan terkait Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Tindak Pidana Asal Dihubungkan dengan Konsep <i>Stand-Alone Money Laundering</i>	126
a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST., Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Tingkat Banding Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, dan Putusan Mahkamah Agung pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor	

97 PK/Pid.Sus/2021 a.n. Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si.....	128
b. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 929/Pid.B/2016/PN. Btm. a.n. Terdakwa Tomi Andhika Janur	153
c. Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.Slr. a.n. Terdakwa Rahim bin Dg. Mamala.....	162
d. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 14/PID.Sus/2016/PN.Pkl. a.n. Terdakwa I Muhammad Taufik, Terdakwa II Khoirul Anam, dan Terdakwa III Zuhri	170
e. Analisis terhadap Putusan Pengadilan berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Tindak Pidana Asal Beserta Parameter yang Digunakan Hakim dalam Menerapkan Konsep <i>Stand-Alone Money Laundering</i>	179
B. Prospek Pengaturan Konsep <i>Stand-Alone Money Laundering</i> dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Tindak Pidana Asal Dikaitkan dengan Pidana Tambahan Perampasan Aset.....	193
1. Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Tindak Pidana Asal dengan Konsep <i>Stand-Alone Money Laundering</i>	196
2. Posibilitas Pengaturan dan Prospek Penerapan Konsep <i>Stand-Alone Money Laundering</i> dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Tindak Pidana Asal	202
a. Konsep <i>Illicit Enrichment</i> dalam Upaya Optimalisasi Perampasan Aset	213
b. Konsep <i>Unexplained Wealth</i> dalam Upaya Optimalisasi Perampasan Aset.....	216
c. Perbandingan Konsep <i>Stand-Alone Money Laundering</i> dengan Konsep <i>Illicit Enrichment</i> dan Konsep <i>Unexplained Wealth</i> dalam Upaya Optimalisasi Perampasan Aset	219

3. Efektivitas Penerapan Konsep <i>Stand-Alone Money Laundering</i> Dalam Pemaksimalan Perampasan Aset Tindak Pidana.....	221
4. Prospek Pengaturan Pidana Tambahan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	224
BAB V PENUTUP	238
A. Kesimpulan.....	238
B. Saran.....	241
DAFTAR PUSTAKA	243